

Judul : Eva Sundari : BPK Jangan Berpolitik
Tanggal : Sabtu, 20 Oktober 2012
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 3

Eva Sundari: BPK Jangan Berpolitik

[JAKARTA] Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih belum menyelesaikan pemeriksaan investigatif atas proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Padahal hasil pemeriksaan investigatif itu sangat ditunggu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) mengkritisi kelambanan BPK dalam menuntaskan pemeriksaan investigatif. Demikian benang merah pendapat anggota BAKN dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno yang dihimpun *SP* secara terpisah, di Jakarta, Jumat (19/10).

pakan sebuah kewajaran BAKN untuk mempertanyakan keseriusan BPK. "Apa pun urusan tentang akuntabilitas keuangan negara menjadi tugas pokok dan fungsi BAKN untuk mengawasi. BAKN bisa mempertanyakan kenapa BPK memperlambat proses audit Hambalang," tukas anggota Komisi III DPR ini.

Senada dengannya, Teguh juga meminta BPK segera menuntaskan audit Hambalang. Independensi dan kredibilitas BPK berdasarkan UUD 1945 akan dipertanyakan oleh publik jika masih belum bisa menuntaskan masalah ini. "BPK harus segera tuntaskan. Jangan sampai menimbulkan tanda tanya publik kenapa berlama-lama," kata Teguh.

Menurutnya, sangat tidak la-



Eva Kusuma Sundari

DOK SP

zim bagi lembaga negara seperti BPK, lamban dalam bekerja. "Semakin cepat semakin baik, karena hasilnya ditunggu oleh penegak hukum. Agak tidak lazim BPK berlama-lama," tegas anggota Komisi V DPR ini.

Dia mengaku akan mengusulkan digelarnya forum konsultasi antara BAKN dengan BPK. Dijelaskan, BAKN memang tidak bisa memanggil BPK, tapi forum konsultasi atas seizin Pimpinan DPR bisa mempertemukan kedua pihak. "Bila hal ini masih berlarut-larut, kita saya akan usulkan ke BAKN untuk gelar forum konsultasi, seizin pimpinan DPR," ujarnya.

Belum Terima

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, hingga kini pihaknya masih menunggu laporan audit BPK dalam kasus dugaan proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Hal ini penting untuk mengetahui be-

rapa kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek tersebut.

"Audit, yang diminta KPK dari BPK itu adalah mengenai sport center di Hambalang. Belum selesai penghitungan kerugian negaranya. Kita masih menghitung kerugian negara akibat perbuatan tersangka," kata Johan.

Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK Bahtiar Arif mengatakan, sejauh ini Tim Pemeriksa BPK masih melengkapi keterangan-keterangan dan bukti untuk melaporkan hasil audit kepada DPR dan penegak hukum. Dia juga membantah adanya spekulasi yang menyebutkan oknum di BPK menahan laporan tersebut. Karena hasil pemeriksaan tim sudah dua kali dibicarakan dalam sidang BPK. [E-11/C-6]